

DPRD PERTANYAKAN PENGELOLAAN REKLAME
Angka Kemiskinan Hingga Kondisi BUMD



KR-Widiastuti

Banggar menyampaikan Pandangan Umum terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

PENGASIH (KR) - Salah satu catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan tahun 2024 adalah Pengelolaan Pajak Reklame yang belum berizin (557 reklame) dan yang belum diterbitkan SK Penetapan Pajaknya (165 reklame). DPRD Kabupaten Kulonprogo minta penjelasan terkait upaya-upaya apa yang sudah dan yang akan dilakukan.

Demikian dikatakan Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Kulonprogo Tito Kurniawan SH dalam Pandangan Umum Banggar terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024, di Ruang Kresna Gedung DPRD setempat, Kamis (8/5).

Banggar juga menyoroti terhadap angka kemiskinan di Kulonprogo masih konsisten pada posisi tertinggi di

DIY, meskipun program bantuan tunai untuk warga miskin sudah diberikan.

”Sebenarnya yang dibutuhkan adalah ketrampilan dan lapangan pekerjaan. Upaya apa yang sudah dan akan dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan keterampilan para pencari kerja dan memperluas lapangan kerja di Kulonprogo,” kata Tito.

Selain itu, Banggar minta penjelasan dalam upaya memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), apa yang dilakukan Pemerintah Daerah terhadap kinerja dan pendapatan BUMD yang mengalami penurunan di setiap tahunnya.

”Bagaimana kebijakan ke depan untuk meningkatkan dan mengembangkan BUMD agar tidak menjadi beban APBD dan mampu memberikan kontribusi ke PAD secara signifikan,” ucap Tito.

Bupati Kulonprogo Dr HR Agung Setyawan ST MSc MM menyatakan realisasi pendapatan Rp1,75 Trilyun atau kurang dari target sebesar 0,37 persen. Realisasi Belanja Rp1,77 Trilyun atau 94,87 persen dari anggaran. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Rp125,2 Miliar atau 96,01 persen dari target. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Rp 12,1 Miliar atau 69,96 persen dari anggaran. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SilPA) Rp 89,6 Miliar yang terjadi antara lain karena pelampauan target pendapatan dan efisiensi penggunaan anggaran belanja.

Seusai acara, Agung Setyawan kepada wartawan menuturkan koreksi dari DPRD positif, ada beberapa item, nanti akan diberikan penjelasan. Terkait reklame, perlu kejelasan dan ketegasan mengenai peraturan pemasangan reklame. Ada beberapa bahkan mayoritas reklame yang belum tertata dengan baik.

”Sedangkan angka kemiskinan akan dievaluasi. Dengan daerah lain yang tidak usah disebut di DIY ternyata hanya ada salah persepsi pengambilan penilaian. Kita ini tidak belanja bahan kebutuhan pokok, tidak dalam kondisi miskin, tetapi kita kondisi daerah produksi.

(Wid)

JELANG IDUL ADHA DI GUNUNGKIDUL

Perketat Lalin Perdagangan Hewan

WONOSARI (KR) - Menjelang Hari Raya Idul Adha Dinas Peternakan dan Kesehatan (DPKH) Kabupaten Gunungkidul akan memperketat lalu-lintas (Lalin) perdagangan hewan ternak.

Kebijakan tentang pengaturan jual-beli hewan ternak tersebut untuk mengantisipasi pe tebaran kasus antraks yang terjadi di dua lokasi zona merah, Kapanewon Girisubo dan Rongkop.

Kepala DPKH Gunungkidul Wibawanti Wulandari mengatakan pengetatan lalu lintas ternak dilakukan dengan pengawasan di tingkat peternak dan dua pasar hewan yakni di Siyonoarjo dan Munggi, Semanu.

”Pengawasan ini dilakukan, agar hewan ternak yang sakit tidak dijualbelikan.”

”Jadi kalau ada hewan yang sakit agar tidak dikeluarkan dari kandang apalagi dijualbelikan,” katanya.

Kebijakan pengawasan ini akan dilakukan secara rutin, baik kepada para peternak maupun di pasar hewan. Sedangkan menyangkut pengiriman hewan ternak juga harus memiliki persyaratan di antaranya harus sudah divaksin dan memiliki kartu keterangan sehat hewan. Sehingga hewan ternak yang belum mendapatkan vaksin tidak boleh keluar. Apalagi, hewan ternak yang berada di wilayah terpapar antaraks. Berdasarkan aturan ketika di suatu wilayah terdapat kasus maka tidak boleh ada lalu lintas ternak, minimal 20 hari, sejak ditemukannya kasus terakhir. Dalam waktu 20 hari tersebut harus ada



KR-Bambang Purwanto

Pedagang ternak di pasar Hewan Siyonoarjo selalu dipantau dan diawasi DPKH.

pemberian antibiotik dan vaksinasi. ”Kami berharap peternak kooperatif dan patuh terhadap kebijakan ini” imbuhnya.

Beberapa waktu lalu bahea Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Gunungkidul menemukan dua kasus hewan ternak mati diduga terpapar antraks pada pekan lalu, tepatnya pada 26 April 2025. Ke dua hewan ternak jenis sapi dan ka.bing yang mati tersebut ditemukan Kalu-

rahan Tileng, Girisubo, yang saat ini berstatus zona merah antraks.

Kedua bangkai hewan tersebut sudah dikuburkan sesuai SOP antaraks. Pihaknya juga sudah mengambil sample darah, dan hingga saat ini masih menunggu hasil pemeriksaan dari BBVT (Balai Besar Veteriner).

Dari DPKH juga sudah mendeteksi yang terkonaminasi untuk diguyur formalin. (Bmp)

CEGAH POTENSI KERACUNAN

Sekolah Monitor Kualitas Makanan MBG

SENTOLO (KR) - Sejak program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Kulonprogo dilaksanakan tiga bulan lalu, memang tidak ditemukan adanya persoalan serius. Utamanya di Kapanewon Sentolo yang menjadi salah satu wilayah pelaksanaan MBG sejak pertengahan Januari 2025 diklaim berjalan lancar.

Pelaksanaannya pun diklaim masih lancar sampai saat ini. Seperti yang disampaikan oleh

”Sejauh ini pelaksanaannya (MBG-Red.) masih lancar, kualitas dan pilihan menunya juga masih bagus,” kata Kepala SD Negeri 2 Sentolo, Nur Akhadiyah, Rabu (7/5).

Seperti diketahui saat puasa Ramadan, menu MBG sempat dialihkan dalam bentuk makanan ringan dan setelah Ramadan, menu makanan dikembalikan dalam bentuk leng-



KR-Asrul Sani

Siswa SD menikmati hidangan MBG.

kap.

Menanggapi adanya sejumlah kasus keracunan di beberapa daerah, Nur Akhadiyah menegaskan pihaknya sudah mengambil langkah-langkah antisipasi. Salah satunya selalu berkomunikasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sentolo sebagai penyedia MBG.

”Setiap pagi sebelum pengantaran, kami selalu menanyakan tentang menunya

agar bisa memperkirakan seberapa lama makanan tersebut bisa bertahan tidak basi,” ujarnya.

Kalau ada lauk atau sayur yang tidak tahan lama hingga siang, maka paket MBG langsung diberikan ke pelajar setelahnya di sekolah. Prinsipnya makanan tersebut harus segera dikonsumsi sebelum tengah hari.

Sebaliknya kalau kualitas sayur dan lauknya

diperkirakan bisa sampai siang hari, maka pelajar akan mengonsumsinya di siang hari. Setibanya di sekolahan, pihak sekolah juga selalu mengecek kondisi makanan tersebut.

”Seperti hari ini, kami sudah cek dan tiap porsi ada nasi dengan lauk ayam goreng, sayur acar, galantin, buah dan susu,” tuturnya.

Pihaknya berharap SPPG sebagai pelaksana MBG hendaknya bisa memastikan kualitas makanan yang diberikan agar tidak bermasalah. Seperti memperhatikan masa simpan bahan makanan, waktu masak, hingga durasi pengantaran.

Hal senada disampaikan Bupati Kulonprogo, Agung Setyawan, hingga saat ini pelaksanaan MBG di kabupaten ini masih aman tanpa ada masalah keracunan makanan.

(Rul)

WUJUDKAN PEMERINTAHAN BERKUALITAS

Pemkab Deklarasi Komitmen ZI-WBK-WBBM

WONOSARI (KR) - Mewujudkan tata pemerintahan yang berkualitas dan dinamis, Pemkab Gunungkidul menggelar Deklarasi Penguatan Komitmen Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kantor Pemkab, Selasa (07/5). Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih menyatakan, deklarasi hari ini merupakan momentum penting dalam akselerasi misi pertama RPJMD 2021-2026. i Mewujudkan tata pemerintahan yang berkualitas dan dinamis,” kata Bupati Gu-

nungkidul Endah Subekti Kuntariningsih. Acara ditandai dengan pemukulan gong sebagai simbol deklarasi serta penandatanganan komitmen bersama dan Pakta Integritas oleh para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Direktur RSUD Wonosari. Program ini untuk mempercepat reformasi birokrasi dan menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik. Inspektur Daerah Gunungkidul Saptoyo mengatakan, pembangunan ZI adalah proses berkelanjutan yang memerlukan keterlibatan aktif seluruh unsur pimpin-



KR-Dedy EW

Bupati bersama OPD saat deklarasi.

an dan pegawai.

Sekretaris Daerah Gunungkidul Sri Suhartanta menuturkan, Zona Integritas adalah cerminan dari keseriusan perangkat daerah dalam mengimplementasikan reformasi birokrasi. iPembangunan ZI bukan

hanya formalitas, tapi instrumen strategis untuk menciptakan birokrasi yang bersih, akuntabel, dan efektif. Evaluasi dan survei eksternal harus dijadikan cermin untuk terus berbenah,” ucapnya.

(Ded)

DPRD GUNUNGKIDUL MINTA

Tahun 2025 Angka Kemiskinan Bisa Diturunkan

WONOSARI (KR) - Ketua DPRD Gunungkidul, Endang Sri Sumiyartini meminta agar jumlah angka kemiskinan terus diupayakan dapat diturunkan. Berdasarkan Laporan Kerja Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD 2024, angka kemiskinan di Gunungkidul mengalami penurunan 0,42 persen dan tahun 2023, jumlah keluarga miskin di Gunungkidul mencapai 15,6 persen dan tahun lalu berkurang menjadi 15,18 persen. ” Kami berharap jumlah keluarga miskin di Gunungkidul bisa diturunkan,” katanya.

Dengan masih adanya jumlah angka kemiskinan penurunan harus bisa lebih dioptimalkan untuk mewujudkannya, program dan kebijakan dari Pemkab agar difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Salah satunya dengan melakukan

sinkronisasi program penanganan kemiskinan daerah, mengacu pada Instruksi Presiden No.4/2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Selain itu, juga bisa dilaksanakan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan UMKM dan pemberian pelatihan bagi warga keluarga kurang mampu.

Pengembangan infrastruktur yang memadai seperti jalan, air, sanitasi hingga listrik sehingga dapat diakses Masyarakat dengan mudah. Penggunaan data yang akurat dan pemanfaatan teknologi juga bisa menjadi kunci dalam upaya pengentasan. ”Kami mendorong semua pihak dapat berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan ini,” imbuhnya.

Kepala Badan Perencanaan Pem-

angunan Daerah (Bappeda) Gunungkidul, Mohammad Arif Aldian mengatakan, pemkab berkomitmen untuk mengurangi jumlah warga miskin dan setiap tahunnya, jumlahnya juga terus berkurang.

Pada Tahun 2023, jumlah warga miskin di Gunungkidul sebanyak 15,60 persen dan terakhir Tahun 2024 turun menjadi 15,18 persen.

Jumlah Penurunannya memang tidak ada 1 persen. Tetapi, capaian ini termasuk yang tertinggi di Propinsi DIY. Untuk Tahun 2025 pihaknya sudah menyiapkan sejumlah program agar target penurunan kemiskinan Tahun 2025 bisa tercapai. Meski tidak memberikan rincian pasti, namun secara gambaran program yang dipersiapkan mulai dengan model konsumsi maupun nonkonsumsi.

(Bmp/Ewi)

Cuaca Ekstrem, Jaga Kesehatan

PENGASIH (KR) - Cuaca ekstrem seperti saat ini sangat berpengaruh terhadap daya tahan tubuh kita. Karena itu diimbau kepada masyarakat untuk menjaga daya tahan. ”Banyak cara untuk menjaga daya tahan tubuh. Terpenting adalah kita ingat makanan bergizi atau seimbang, sayur dan buah harus diperbanyak. Karena cuaca sangat panas jangan lupa banyak minum air putih,” pesan Kepala Dinas Kesehatan Kulonprogo dr Sri Budi Utami MKes, Kamis (8/5).

Sri Budi menyatakan pihaknya selalu mengingatkan di berbagai kesempatan agar jangan lupa minum.



KR-Widiastuti

dr Sri Budi Utami MKes

”Yang penting minum air sebanyak-banyaknya. Jaga istirahatnya serta olahraga ringan dan teratur, ini akan sangat membantu daya tahan,” katanya.

Ditambahkan, tentu dalam masa cuaca ekstrem

akan muncul penyakit-penyakit terkait pancaroba seperti *gondongan* yang dulu sempat agak tinggi, juga *beleken* atau sakit mata, kemudian cacar air. Tapi untuk sementara di Kulonprogo masih aman.

”Ada iya tetapi kalau yang kemarin sempat banyak yang *gondongan*, sekarang landai. Termasuk demqon berdarah dengue (DBD) meski cuaca panas tetapi karena hujan kemudian panas itu juga sesuatu yang harus diperhatikan. Sementara kasus DBD mereda, namun semua juga harus tetap diperhatikan,” tandas Sri Budi.

(Wid)